




REGULASI PENYIARAN DI INDONESIA


Era Reformasi & Berakhirnya Era Orde Baru

- Proses disahkannya undang-undang penyiaran tersebut terjadi pada era pemerintahan Presiden Megawati.
- Tujuannya untuk menghasilkan kebijakan yang memajukan industri penyiaran di Indonesia

3 Hal Penting Regulasi Penyiaran

1. Iklim demokrasi kekinian, urgensi yang mendasari penyusunan regulasi penyiaran adalah hak asasi manusia tentang kebebasan berbicara, berpendapat tanpa adanya intervensi,

- 
2. Jaminan keberagaman politik dan kebudayaan, kebebasan aliran ide dan posisi dari kelompok minoritas.
- Limitasi keberagaman, seperti kekerasan dan pornografi merupakan hal yang tetap tidak dapat dieksploitasi
 - Dalam perkembangannya aspek keberagaman, lebih banyak diafiliasikan sebagai aspek politik dan ekonomi dalam konteks ideologi suatu negara.



3. Alasan ekonomi mengapa regulasi media diperlukan. Tanpa regulasi akan terjadi “**konsentrasi media**”. Sinkronisasi diperlukan bagi penyusunan regulasi media agar tidak berbenturan dengan berbagai kesepakatan internasional, misalnya perdagangan bebas.

Model regulasi penyiaran menurut Mc Quail

1. Model Otoriter

- Tujuan : upaya menjadikan penyiaran sebagai alat negara.
- Ciri khas : kuatnya lembaga sensor terutama yang menyangkut keberbedaan
- konsekuensi keberbedaan yang dipandang sebagai sesuatu yang tidak berguna dan cenderung tidak bertanggung jawab karena dianggap subversif
- konsensus dan standarisasi dilihat sebagai tujuan dari komunikasi massa

2. Model Komunis

- subkategori dari model otoriter
- penyiaran memiliki semacam tritunggal fungsi, yaitu propaganda, agitasi (hasutan untuk pemberontakan), dan organisasi
- dilarangnya kepemilikan swasta, karena media dalam model ini dilihat sebagai milik kelas pekerja, dan media merupakan sarana sosialisasi, edukasi, informasi, motivasi, dan mobilisasi.

3. Model Barat-Paternalistik


- Disebut Paternalistik, karena sifatnya yang *top-down*
- Kebijakan media bukan apa yang audien inginkan tapi lebih sebagai keyakinan yang dibuat memang dibutuhkan dan diinginkan oleh rakyat.
- Dalam model ini, penyiaran juga memiliki tugas untuk melekatkan fungsi-fungsi sosial individu atas lingkungan sosialnya

4. Model Barat Liberal

- Mirip Model barat paternalistik, hanya berbeda dalam fungsi media komersialnya
- Disamping sebagai penyedia informasi dan hiburan, media juga memiliki fungsi mengembangkan hubungan yang penting dengan aspek-aspek lain yang mendukung independensi ekonomi dan keuangan


5. Model Demokrasi Partisipan

- Model ini dikembangkan oleh mereka yang mempercayai sebagai *powerful medium*, dan dalam banyak hal terinspirasi oleh mazhab kritis
- Termasuk dalam model ini adalah berbagai media penyiaran alternatif.
- Sifat komunikasi dalam model ini adalah dua arah




Secara fundamental, regulasi penyiaran harus mengandung substansi :

1. Menetapkan sistem tentang bagaimana dan siapa yang berhak mendapatkan lisensi penyiaran.
2. Memupuk rasa nasionalisme.


- 
3. Secara ekonomis, melindungi institusi media domestik dari kekuatan asing.
 4. mencegah konsentrasi dan untuk membatasi kepemilikan silang.

Di Uni Eropa ada komisi khusus yang mengatur tata laksana merger dan pengawas kuota media.

- 
5. Sebagai *regulation of fairness* yang memuat prinsip objektivitas, imparcialitas (memuliakan hak individu) dan akuntabilitas. Diperlukan selain untuk membangun media yang sehat juga untuk menjaga keseimbangan hubungan antara pengelola penyiaran, pemerintah dan audien.
 6. Mengatur tata-aliran keuangan dari sumber yang berbeda. Dana komersial, misalnya harus dibatasi guna melindungi konsumen dari iklan yang ekseesif (melampaui kebiasaan), paling tidak dari bentuk promosi tertentu dan untuk mencegah pengiklanan yang berlebihan terhadap suatu acara.

Fungsi Institusi *Regulatory Body*

1. Mengalokasikan lisensi penyiaran.
2. Mengontrol dan memberi sanksi bagi pengelola penyiaran yang melanggar mulai dari bentuk denda sampai pada pencabutan izin.
3. Memberikan masukan kepada institusi legislatif.


- 
4. Sebagai *watchdog* bagi independensi penyiaran dari pengaruh pemerintah dan kekuatan modal.
 5. Memberikan masukan terhadap penunjukan jajaran kepemimpinan lembaga penyiaran publik.
*Hal ini banyak terjadi di Prancis.
 6. Berperan sebagai penyidik dan komisi komplain.


Regulasi Penyiaran Dalam konteks Diversitas Politis dan Kultural

1. berisi peraturan yang mencegah terjadinya monopoli atau penyimpangan kekuatan pasar
2. proteksi terhadap nilai-nilai pelayanan publik (*public service values*)
3. berisi aplikasi sensor yang bersifat paternalistik.

era liberalisasi industri media menimbulkan ancaman terhadap kualitas kebebasan pers

1. Sejalan dengan penambahan jumlah institusi penyiaran swasta dan kompetisi di antara mereka, maka tingkah laku industri penyiaran akan semakin ditentukan oleh apa yang disebut **Kellner** sebagai "logika kepentingan akumulasi modal yang notabene merupakan konstitusi rezim kediktatoran pasar".


- 
2. Kaidah akumulasi modal jelas juga akan membuat biaya memperoleh akses ke media penyiaran menjadi mahal, hanya terjangkau oleh kelompok atau individu tertentu.
 - Bagi kelompok publik yang tidak memiliki kekuatan politik ataupun tidak memiliki sumber daya, maka peluang untuk memperoleh akses ke media guna menyuarakan isu kepentingan mereka, tentu akan diperkecil oleh kepentingan industri media dalam menampilkan isu dan peristiwa yang memiliki nilai jual



3. Kaidah dan logika mekanisme pasar jelas juga berpotensi besar mendepak keluar institusi media yang tak mampu mematuhi konstitusi rezim kapital, khususnya berupa tekanan dari pasar pengiklan.

4. Mekanisme pasar bebas akan menciptakan sebuah struktur yang mereproduksi kesenjangan antar kelas ekonomi dalam masyarakat. Kelas ekonomi menengah ke atas misalnya, cenderung menjadi segmen "**quality newspaper**" dan "**quality programs**" sedangkan stratum bawah akan menjadi segmen "**yellow newspaper**" dan "**yellow programs**". Segmentasi semacam ini jelas berpotensi *gap* rasionalitas di antara warga negara.

5. Ekspansi *market regulation* juga akan semakin menempatkan para jurnalis dalam posisi lemah, hanya sebagai salah satu faktor produksi komoditas informasi dan hiburan. Sedangkan pasar, pada satu sisi menyadari bahwa negara dan publik memiliki sentimen negatif terhadap dirinya, namun pada saat yang bersamaan, pasar melihat penyusunan regulasi tersebut sebagai suatu kesempatan untuk mengukuhkan upaya-upaya dominasi dalam dunia penyiaran.



Dalam konteks penyiaran, terjadi dinamika kekuasaan yang cukup menarik antara legislatif dan eksekutif.

- Kedua unsur representasi kekuatan *state* yang pada era sebelum reformasi merupakan suatu kekuatan yang solid bahkan monolitik (kesatuan terorganisasi yg membentuk kekuatan tunggal&berpengaruh), berubah menjadi kekuatan yang terfragmentasikan.

Perbedaan & Persamaan Pertumbuhan Industri Penyiaran di AS & Indonesia

AS

Indonesia

dimulai dari stasiun penyiaran radio dan televisi lokal

-penyiaran radio dimulai dari tingkat lokal
-Televisi dimulai dari tingkat nasional

Latar belakang terbentuknya sistem jaringan di Amerika : murni bisnis, agar pemasang iklan bisa mempromosikan produknya kepada masyarakat yang lebih luas

Latar belakang : semangat membangun stasiun penyiaran swasta yang dimulai dari pemilik modal yang sangat dekat dengan kekuasaan pada era orde baru

TERIMAKASIH

- Source:
- Andi Fachruddin & Hidajanto Djamel. 2011. Dasar-Dasar Penyiaran. Kencana Prenada Media Group. Jakarta.
- Riswandi. 2009. Dasar-Dasar Penyiaran. Graha Ilmu. Jakarta.